

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK

2024

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CEMPAKA BARU NO 11 TAHUN 2024, 52 HLM.
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHAN CEMPAKA BARU

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat membantu masyarakat dengan lebih baik diperlukan pelayanan publik. Sehingga perlu disusun atau dibentuk standar pelayanan pada Kantor Kelurahan Cempaka Baru sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan standar pelayanan publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib Menyusun, Menetapkan dan Menerapkan Standar Pelayanan
- Dasar Hukum dari Penetapan Kelurahan Cempaka Baru ini adalah UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 29 Tahun 2007; UU Nomor No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perma No. 5 Tahun 2019; Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997; Permen Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; Permen Agama No 20 Tahun 2019; Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 1998; Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Islam No. 473 tahun 2020; Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub DKI Jakarta Nomor 217 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pergub No 239 Tahun 2015; Pergub DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta No. 152 Tahun 2019; Keputusan Gubernur Nomor 2230 Tahun 2004; Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 14 Tahun 2020; Keputusan Walikota No. 86 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Kelurahan Cempaka Baru tentang penetapan standar pelayanan pada Kantor Kelurahan Cempaka Baru meliputi pelayanan urusan pertahanan dan waris; standar pelayanan pencatatan surat pernyataan ahli waris WNI; standar pelayanan urusan perkawinan; standar pelayanan urusan lainnya. Standar pelayanan wajib dilaksanakan dengan mekanisme dan prosedur alur, serta evaluasi yang akan dilaksanakan sekali dalam setahun.

Catatan : - Keputusan Lurah ini mulai berlaku sesuai tanggal yang ditetapkan pada 15 Mei 2024;

- Lampiran : 52 halaman.